

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pancasila merupakan sistem nilai yang digali dari nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Pancasila juga merupakan dasar negara sekaligus ideologi nasional yang dijadikan sebagai pedoman bagi penyelenggaraan bernegara. Kedudukan Pancasila sebagai ideologi bangsa menjadikan Pancasila sebagai suatu visi untuk penyelenggaraan kehidupan berbangsa kedepannya sekaligus sebagai cita-cita normatif bagi bangsa Indonesia. Sebagai sebuah ideologi bangsa, Pancasila juga dipandang sebagai filosofische grandslag dan weltanschauung atau pandangan hidup bangsa Indonesia. Kedudukan Pancasila sebagai falasafah dasar negara menjadikan Pancasila sebagai suatu sumber hukum tertinggi yang mengharuskan setiap peraturan atau produk hukum di Indonesia memuat nilai-nilai yang termuat pada Pancasila dan tidak diperbolehkan berlawanan dengan nilai-nilai tersebut.

Pancasila setidaknya memuat lima nilai yang terkandung pada setiap silanya, yaitu nilai Ketuhanan, nilai Kemanusiaan, nilai Persatuan, nilai Musyawarah atau nilai Kedaulatan Rakyat, dan nilai Keadilan sosial. Mengkaji lebih mendalam, maka setidaknya ditemukan dua inti nilai utama diantara kelima nilai tersebut, yaitu nilai Religiusitas dan nilai Komunalitas (Fuad, 2016). Nilai-nilai yang termuat pada setiap sila dalam Pancasila bukan hanya sebuah bentuk pedoman secara etik dan moral saja, namun muatan tersebut harus dihayati dan diimplementasikan dalam kepribadian bangsa Indonesia. Kedudukan dari Pancasila yang sangat fundamental serta muatan nilai-nilai yang terkandung dalam setiap silanya tidak terlepas dari hasil usaha para founding fathers dan

tokoh bangsa dalam memperjuangkan Pancasila sebagai sebuah dasar negara Indonesia.

Pancasila sendiri menempuh proses yang sangat panjang sebagai sebuah dasar negara serta ideologi bangsa yang diakui dan disepakati secara bersama. Dalam proses tersebut bentuk dasar negara Indonesia sendiri mengalami sebuah diskusi panjang dengan berujung nya sebuah perdebatan pada sidang BPUPK pertama di tahun 1945 atau pada sidang Konstituante di tahun 1950. Perdebatan itu sendiri memunculkan adanya kelompok atau golongan yang membawa ide atau pemikirannya masing-masing mengenai prinsip-prinsip dasar negara. Pada proses diskusi tersebut terlihat ada dua golongan yang sangat dominan disaat membicarakan dasar negara, yaitu golongan kebangsaan/nasionalis dan golongan agamis, walaupun pada praktiknya terdapat golongan ketiga yaitu golongan sosialis. Golongan nasionalis membawa konsep Pancasila sebagai dasar negara sedangkan kelompok agamis membawa konsep Islam sebagai dasar negara. Menurut Latif (2011: 69) perdebatan antara kedua golongan dimulai dalam perselisihan mengenai memandang hubungan negara dan agama, walaupun kedua golongan sepakat untuk memandang pentingnya nilai Ketuhanan.

Perdebatan terus berlanjut dalam sidang BPUPKI pertama dimana golongan agamis berpandangan bahwa konsep negara tidak boleh dipisahkan dari agama. Kondisi perdebatan yang sama juga kembali terjadi dalam Majelis Konstituante yang kembali muncul dengan adanya usulan dan rancangan oleh tiga fraksi dalam Majelis Konstituante mengenai dasar negara, yaitu fraksi Pancasila, Islam, dan Sosial-Ekonomi (Maarif, 2006: 126). Terlepas perdebatan panjang antara kedua golongan tersebut baik dalam sidang BPUPK 1945 atau dalam

perdebatan dalam Konstituante terkait dasar negara Indonesia, keduanya berakar pada satu permasalahan mendasar yaitu memandang hubungan antara konsep agama Islam dan konsep Pancasila sebagai dasar negara. Menurut Fuad (2012: 164) dalam memandang hubungan antara Islam dan Pancasila, akan selalu dikaitkan dengan bentuk wacana perdebatan terkait landasan filosofis negara. Hal ini terjadi karena masing-masing golongan memiliki pandangan yang berbeda dalam melihat hubungan kedua konsep tersebut. Dalam perdebatan terkait hubungan konsep Islam dan Pancasila sebagai dasar negara, hasilnya adalah sebuah situasi yang membenturkan dan saling menghadapkan secara komparatif antara kedua konsep tersebut.

Mengkaji lebih mendalam setidaknya terdapat titik temu atau persamaan yang dapat menjadi jembatan perantara antara Islam dan Pancasila, hal tersebut terletak pada muatan nilai Ketuhanan dalam Pancasila. Pandangan terkait pengertian dan definisi dari konsep nilai Ketuhanan sendiri sangat beragam dan memiliki prespektif yang sangat luas. Menurut Soekarno dalam pidato 1 Juni 1945 konsep Ketuhanan yang berkebudayaan digunakan sebagai pemaknaan dari konsep nilai Ketuhanan pada sila pertama (Fanani, 2008). Konsep tersebut menekankan pada budi pekerti yang luhur serta toleransi dalam beragama. Menurut Kamaruddin (2013) konsep nilai Ketuhanan merupakan bentuk perwujudan Indonesia sebagai negara yang secara etis dan moral mengakui keberadaan dari Tuhan itu sendiri, namun menurut Latif (2011) nilai Ketuhanan dalam Pancasila sendiri dianggap sebagai sumber etika dan spiritualitas yang fundamen bagi etik kehidupan berbangsa dan bernegara.

Nilai Ketuhanan dalam sila pertama Pancasila memiliki relevansi yang kuat dengan konsep beragama. Agama sendiri merupakan sebuah peraturan yang diyakini dapat mengatur kehidupan dan keadaan manusia, mulai dari kehidupan berbudi pekerti, maupun kehidupan bermasyarakat (Ismail, 1997). Selain itu baik sila pertama dalam Pancasila maupun konsep agama, keduanya memiliki persamaan yang terletak pada konsep religiusitas. Menurut King dan Williamson (2010) (dalam Iddagoda & Opatha, 2017) konsep religiusitas merupakan sebuah kekuatan dalam hubungan dan keyakinan seseorang terhadap agama. Dalam hal tersebut hubungan antara manusia dan Tuhan nya bersifat vertikal, sama seperti konsep agama.

Di sisi lain, religiusitas menimbulkan perwujudan atas perintah agama nya dalam keberbagai dimensi. Hal tersebut dijelaskan secara komprehensif melalui teori Glock dan Stark dalam mendefinisikan religiusitas. Menurut Glock dan Stark (1965) religiusitas merupakan sikap keberagamaan pada seseorang yang telah terinternalisasi pada bagian-bagian yang tidak terpisahkan pada kehidupan seseorang, sehingga menjadikan bagian-bagian tersebut menjadi sebuah keterikatan seseorang terhadap agama yang dipeluknya atau disebut dengan Religious Commitment, selanjutnya Glock dan Stark membagi konsep religiusitas tersebut menjadi lima dimensi yaitu dimensi ritualistik (ritualistic), dimensi kepercayaan (belief), dimensi pengetahuan (knowledge), dimensi pengalaman (experiential) dan dimensi konsekuensial (consequential).

Melalui pemahaman akan konsep teori religiusitas ini sendiri maka dapat ditemukan adanya satu titik temu diantara konsep agama sebagai keyakinan dan konsep Pancasila sebagai dasar negara Indonesia, yaitu muatan nilai Ketuhanan

dalam sila pertama Pancasila yang didalamnya terdapat pula konsep religiusitas yang menjembatani antara konsep agama yang memuat perintah-perintah Tuhan dan ajaran agama, dengan konsep dari Pancasila itu sendiri yang berkedudukan sebagai dasar negara Indonesia.

Bukti lain dari relevansi antara sila pertama dengan konsep agama dapat dilihat dari aspek historis dan kultural nilai Ketuhanan yang sudah melekat pada karakter asli manusia Indonesia sejak waktu yang lama, yang ditandai dengan munculnya bentuk kepercayaan animisme atau dinamisme dari masa nenek moyang bangsa Indonesia, dilanjut dengan munculnya konsep agama yang bercorak politeisme seperti Hindu dan Buddha hingga masuknya konsep agama yang bercorak monotheisme seperti Islam di Nusantara yang masuk mulai dari abad ke-7 hingga sekarang menjadikan Indonesia menjadi salah satu negara yang memiliki populasi masyarakat Muslim terbesar di dunia. Data menunjukkan dengan jumlah persentase 87,55 persen dari total populasi masyarakat Indonesia itu sendiri memeluk agama Islam, namun terhitung dari tahun 2010 menurut data dari *global religious futures* (dalam Dimock & Hackett, 2015), statistik populasi masyarakat muslim di Indonesia terhitung tahun 2020 turun menjadi 87.0 persen. Melalui pemahaman terhadap aspek historis-kultural nilai Ketuhanan di Indonesia, dapat dipahami bahwasanya muatan nilai Ketuhanan dalam Pancasila merupakan salah satu pengalian terhadap nilai dan karakter asli bangsa Indonesia yang didalamnya tidak terlepas dari kepercayaannya terhadap keberadaan Tuhan. Melalui pemahaman itu pula Menurut Husaini (2009) (dalam Fuad, 2012) dikatakan bahwa semangat dan jiwa religiusitas manusia Indonesia perihalnya meyakini dan mengakui keberadaan Tuhan dalam beragam bentuk keyakinan dan

menolak konsep ketiadaan Tuhan atau atheisme dalam kehidupan manusia Indonesia.

Pada penelitian ini penjelasan mengenai pentingnya makna nilai Ketuhanan sebagai sarana dalam memandang hubungan antara Islam dan Pancasila dibedah melalui proses analisis muatan nilai Ketuhanan dalam buku Urat Tunggang Pancasila karya Buya Hamka. Pengarang buku ini ialah Hamka atau sering dipanggil dengan sebutan Buya Hamka, memiliki nama asli Prof. Dr. H. Abdul Malik Karim Amrullah. Hamka merupakan seorang cendekiawan Muslim publik Indonesia yang aktif di bidang politik, sastra, serta sebagai tokoh agamis (Rush, 2017). Peranan Hamka bagi perjuangan kemerdekaan bangsa sendiri dimulai dengan aktivitasnya sebagai penulis yang aktif dalam koran harian Pedoman Masyarakat dan aktivitas politiknya dalam Masyumi atau Muhammadiyah (Rush, 2017). Pemaparan Hamka terkait pandangannya terhadap nilai Ketuhanan itu sendiri dijelaskan secara komprehensif namun unik dalam buku Urat Tunggang Pancasila, yang merupakan fokus dari penelitian ini sendiri.

Dalam karyanya tersebut Hamka menjelaskan bahwa nilai Ketuhanan memiliki kedudukan yang penting bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, lebih dari itu Hamka juga menekankan pentingnya konsep beragama dalam waktu yang bersamaan. Dalam karyanya itu juga Hamka memilih gagasan penggambaran penting nya nilai Ketuhanan dalam prespektif agama Islam dengan didukung oleh data-data berupa ayat pada Quran dan Hadist. Penggambaran melalui prespektif agama Islam itu sendiri dilatar belakangi oleh faktor yang beralasan, jika dilihat dari latar belakang kehidupan Hamka sebagai Ulama yang tumbuh di lingkungan keluarga yang agamis dan tokoh penting Masyumi pada kala buku ini diterbitkan

(1951), maka sudah sewajarnya Hamka mengagasi dan mengkaji hal tersebut dari prespektif Agama Islam.

Terlepas dari itu, buku Urat Tunggang Pancasila ini sendiri memiliki latar belakang historis yang penting dan relevan dengan permasalahan Islam dan Pancasila sebagai dasar negara. Karyanya ini sendiri muncul sebagai bentuk respons terhadap adanya keresahan golongan agamis pada saat itu, atas pidato kenegaraan Presiden Ir. Soekarno pada saat Isra Mi'raj tanggal 8 Mei 1951 yang menyebutkan adanya golongan-golongan yang memperjuangkan Pancasila tidak seutuhnya, dan hanya memperjuangkan Pancasila hanya dengan menekankan keberadaan sila pertama saja. Pandangan Hamka terhadap Pancasila itu sendiri diterangkan dengan jelas dalam buku Urat Tunggang Pancasila, Hamka (1961: 35) mengatakan bahwa : “marilah kita kaum Muslimin berdjuaug dalam urat tungganga Pantja Sila. Sila Ketuhanan Jang Maha Esa sadja, ja'ni dengan artinja jang penuh. Karena bilamana berdjuaug dengan Sila ke Tuhanan Jang Maha Esa sadja, didjamin akan terpeliharalah Sila Jang Empat lagi.” Melalui salah satu pemaparan dalam buku tersebut, Hamka menegaskan pentingnya makna serta kedudukan sila pertama yang memuat nilai Ketuhanan terutama dalam memandang hubungan antara konsep Islam dan Pancasila sebagai dasar negara.

Penelitian ini bertujuan menghasilkan bentuk temuan terkait muatan nilai Ketuhanan dalam karya Buya Hamka yang berjudul Urat Tunggang Pancasila sebagai bentuk jawaban dari permasalahan-permasalahan yang sudah dipaparkan sebelumnya. Setidaknya ada beberapa urgensi dan alasan mengapa buku Urat Tunggang Pancasila dijadikan sebagai pokok acuan dalam mengkaji muatan nilai

Ketuhanan sebagai sebuah jawaban dari permasalahan penelitian ini sendiri, yaitu disebabkan oleh beberapa alasan yaitu :

Pertama, Bahwa dalam buku ini sendiri Buya Hamka memaparkan penjelasan yang detail dalam menyelesaikan permasalahan terkait memandang konsep agama Islam dan Pancasila dalam ranah bernegara, walaupun dalam karyanya tersebut di bingkai dalam prespektif agama Islam namun dalam segi pemaknaannya dapat diterima oleh berbagai kalangan terlepas dari Agama apapun.

Kedua, Penekanan akan pentingnya muatan nilai Ketuhanan dalam Pancasila pun dijelaskan secara detail dan logis disertai bukti historis mengapa nilai Ketuhanan menjadi penting dalam aspek berbangsa dan bernegara dalam buku Urat Tunggang Pancasila dan juga dalam buku tersebut memuat konsep pemikiran Hamka yang menekankan pada pentingnya rasa cinta pada bangsa yang mana menurut Hamka adalah naluri manusia yang tidak dapat dielakan (Fuad, 2016).

Ketiga, Pembahasan Hamka dalam buku Urat Tunggang Pancasila sangat relevan dengan kajian sehari-hari pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, hal ini dikarenakan dalam muatan buku tersebut Hamka memberikan sebuah pandangan baru dalam melihat Pancasila secara keseluruhan sehingga melalui muatan yang ada di dalam buku ini, dapat dijadikan sebagai salah satu sumber yang bermanfaat dalam menyikapi permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini karena di dalamnya memuat bagaimana muatan nilai Ketuhanan pada Pancasila memiliki relevansi yang kuat pada konsep religiusitas beragama dan Nasionalisme kebangsaan secara bersamaan.

Penelitian ini berfokus pada konsep analisis muatan nilai Ketuhanan dalam buku Urat Tunggang Pancasila karya Buya Hamka. Dalam penulisan ini juga dilaksanakan kajian mengenai makna nilai Ketuhanan, dan bagaimana hubungan nilai Ketuhanan dalam sila Pertama dengan sila-sila lainnya dalam Pancasila menggunakan konsep pemikiran Buya Hamka dalam buku Urat Tunggang Pancasila. Penelitian ini sendiri menggunakan metode penelitian studi kepustakaan dengan teknik analisis konten dalam menganalisis muatan nilai Ketuhanan dalam buku Urat Tunggang Pancasila karya Hamka.

B. Masalah Penelitian

Permasalahan pada penelitian ini adalah terkait dengan memandang konsep agama Islam dan konsep Pancasila sebagai dasar negara secara irrelevant. Bentuk permasalahan ini diwujudkan dengan permasalahan yang ada dalam buku Urat Tunggang Pancasila karya Hamka, yaitu permasalahan yang berasal dari akibat adanya keresahan akibat situasi politik yang terpolarisasi menjadi dua golongan dan keresahan akibat pidato Soekarno yang dianggap menyinggung.

C. Fokus dan Subfokus Penelitian

Pada studi penelitian ini akan didapat fokus penelitian yang menekankan pada Analisis muatan nilai Ketuhanan dalam buku Urat Tunggang Pancasila. Melalui fokus tersebut maka akan didapat bentuk subfokus penelitian yaitu bagaimana muatan nilai Ketuhanan dalam Pancasila menjadi perantara dalam memandang Islam sebagai konsep agama dan Pancasila sebagai konsep dasar negara.

D. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan pemaparan dari latar belakang sebelumnya, maka terdapat pertanyaan penelitian pada penelitian ini sendiri diantaranya adalah :

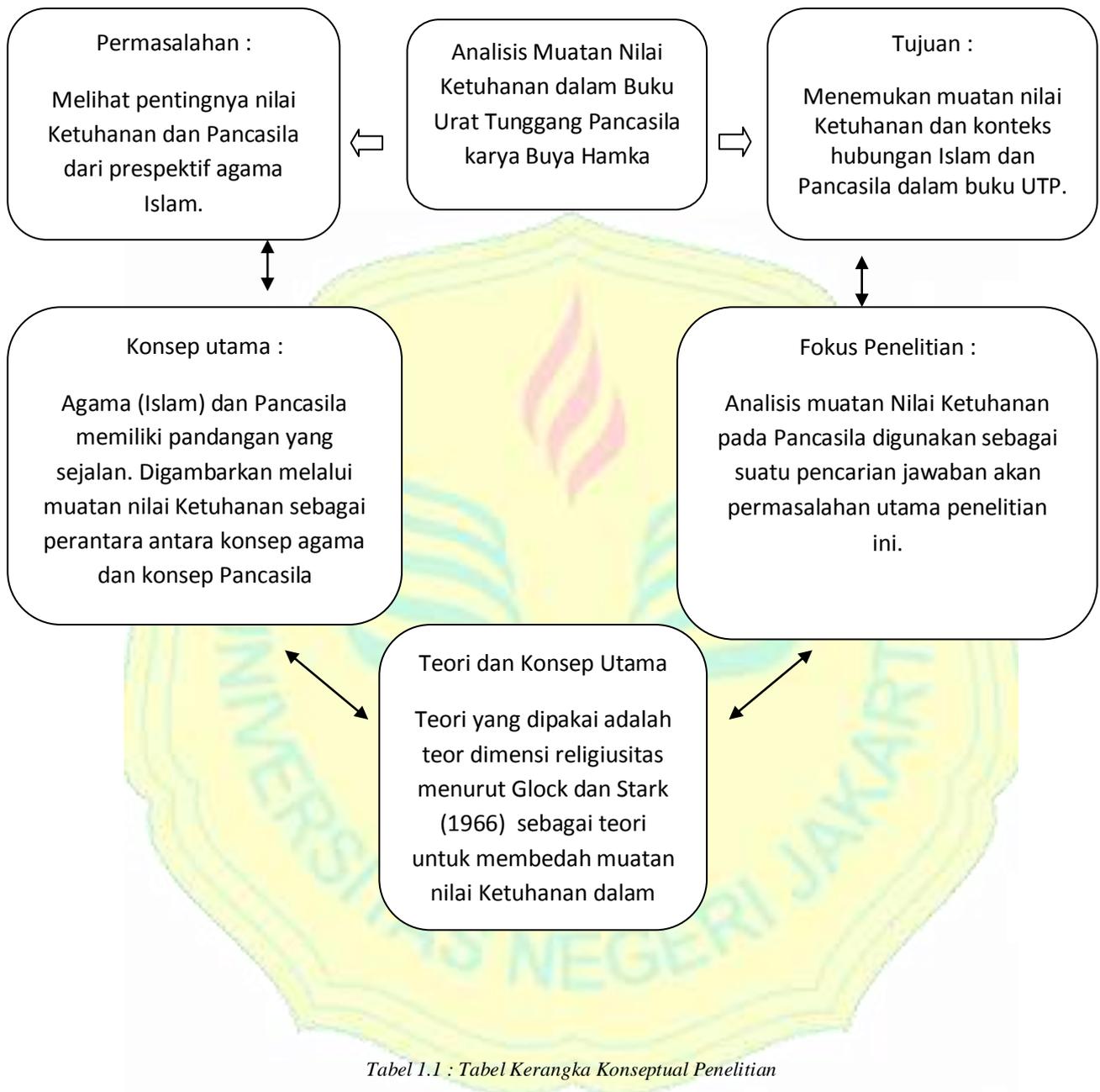
1. Bagaimana muatan nilai Ketuhanan dalam buku Urat Tunggang Pancasila karya Buya Hamka ?
2. Bagaimana muatan buku Urat Tunggang Pancasila karya Buya Hamka memandang hubungan antara konsep Islam dan konsep Pancasila sebagai dasar negara ?

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini sendiri memiliki manfaat penelitian diantaranya adalah :

1. Penelitian ini dapat bermanfaat sebagai sarana untuk mempelajari makna nilai Ketuhanan yang termuat pada sila pertama Pancasila
2. Penelitian ini dapat bermanfaat sebagai sarana untuk mempelajari makna nilai Ketuhanan pada sila pertama Pancasila dengan menggunakan sudut pandang nilai ajaran Islam dalam penjelasannya
3. Penelitian ini juga dapat bermanfaat sebagai salah satu literatur terkait pemikiran Buya Hamka terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara.

F. Kerangka Konseptual



Tabel 1.1 : Tabel Kerangka Konseptual Penelitian